

DAFTAR PUSTAKA

- Agurahe, J. (2019). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*.
- Bakri, & dkk. (2022). PPh atau PPN : Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Dihni, V. A. (2021). *Jumlah Perusahaan Manufaktur Berat dan Sedang Menurut Kota di DKI Jakarta*. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/dki-jakarta-miliki-1628-perusahaan-manufaktur-pada-2021>
- Indonesia, R. (1983). UU No. 06 Tahun 1983. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (1983). UU No. 8 tahun 1983. *Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2009). UU No. 42 tahun 2009. *Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2021). UU No. 07 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Republik Indonesia.
- Isnaini, F. (2019). *Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor Mesin di PT. ABC, Sidoarjo*. Diambil kembali dari Tugas Akhir D3 Thesis, Universitas Airlangga: <https://repository.unair.ac.id/89343/>
- KBBI. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.
- Kuangan, K. (2021). PMK-58/PMK.03/2021. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak*. Kementerian Keuangan.
- Kuangan, K. (2015). PMK-79/PMK.01/2015. *Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuangan, K. (2018). *APBN Kita, Kinerja dan Fakta*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.academia.edu/39967709/APBN_KITA_Scan_untuk_Unduh?rom=cover_page

- Keuangan, K. (2021). PMK-115/PMK.03/2021. *Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Madu, R. (2021). *Buku Profil KPP Madya Dua Jakarta Barat*. Jakarta.
- Nurmantu, & Rasmini. (2014). *Dasar - Dasar Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Perindustrian, K. (2018). *Industri Manufaktur Setor Pajak Terbesar Hingga Rp 103 Triliun*. Diambil kembali dari Siaran Pers:
<https://kemenperin.go.id/artikel/19268/Industri-Manufaktur-Setor-Pajak-Terbesar-Hingga-Rp-103-Triliun>
- Purnomo, & Soerjatno. (2021). *PPN & PPnBM, Teori dan Praktik*. Makassar: Nas Media Indonesia.
- Rani. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D Terhadap Penyerahan Mesin. *Jurnalku*, Volume 1 No. 1.
- Statistik, B. P. (2021). *Direktori Industri Manufaktur*. Diambil kembali dari Publikasi:
<https://www.bps.go.id/publication/2021/10/29/9e665258c573186f163133b2/direktori-industri-manufaktur-2021.html>
- Sugiharto, Hari (2014). *PPN dan PPnBM : Karakteristik PPN Indonesia dan Sejarah Pengenaan PPN sebagai Pajak atas Konsumsi*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmanto, B. (2020). *Persepsi Kebutuhan Karakter Kerja Industri bagi Tenaga Kerja Bekerja di Industri Manufaktur Kabupaten Cirebon*. Diambil kembali dari S1 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta:
<https://eprints.uny.ac.id/67393/>
- Supriyanto, E. (2013). "Manufaktur" Dalam Dunia Teknik Industri. *Jurnal INDEPT*.
- TIK, Direktorat (2021). *Permohonan Surat Keterangan Bebas PPN Untuk Barang yang Bersifat Strategis*. Jakarta : Kementerian Keuangan.

Wijaya, & Arsini. (2021). Fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan : Perbedaan dan Permasalahan. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 2.